

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tema mengenai Analisis Strategis Dinas Koperasi Dalam Memberdayakan dan Mengembangkan UMKM di Kota Medan. Adapun titik fokusnya adalah mengenai pengembangan UMKM di Kota Medan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengembangan UMKM khususnya di Kota Medan, alasan peneliti memilih fokus penelitian karena peneliti tertarik dan ingin memahami bagaimana sistem proses Analisis Strategis Dinas Koperasi Dalam Memberdayakan dan Mengembangkan UMKM di Kota Medan. Sedangkan untuk lokus penelitian adalah di Kantor Koperasi Kota Medan, alasan peneliti memilih lokus tersebut karena di Kantor Koperasi Kota Medan telah Menganalisis Strategis yang terjadi dalam Kantor Koperasi Kota Medan tersebut.

Dalam membangun potensi daerah diperlukan peran pemerintah daerah. Salah satu peran pemerintah daerah adalah menggali potensi Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena UMKM memiliki kedudukan dalam perekonomian nasional dengan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),UMKM juga memiliki peran dalam penyerapan tenaga kerja, menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan memiliki potensi sebagai penghasil devisa dari kegiatan ekspor. Karena itu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah sangat penting, Terutama dalam proses perkembangan UMKM.

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus dapat menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jumlah UMKM itu sendiri, utamanya agar bisa bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.¹

World Economic Forum (WEF) 2018 menempatkan Indonesia berada pada posisi ke-45 dari 140 negara dalam Global Competitiveness Index. Menurut BPS 2018, Perekonomian Indonesia triwulan 1/2018 dibanding triwulan 1/2017 (y-on-) tumbuh 5,06 persen meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Potensi ini yang harus dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal.²

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar baik dibidang sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah Sumatra Utara. Sumatra Utara telah memiliki kawasan budi daya yang berpotensi dan pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya. Dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan, pemerintah Sumatra Utara melaksanakan tugas dan menyusun dan memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan dengan baik. Pemerintah daerah Sumatra Utara juga membentuk Dinas Daerah yang bertugas dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi yaitu Dinas Koperasi dan UMKM di setiap Kabupaten/Kota, dapat mengembangkan UMKM dan meningkatkan daya tarik investasi dalam mengembangkan sektor-sektor UMKM di Provinsi Sumatra Utara khususnya Kota Medan.

¹ Samantha Immanuel Panjaitan, **Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi Dalam Pengembangan Usaha MIKRO Kecil Menengah Kota Medan**, Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, Medan: 2019, hal. 1

² Ibid., hal. 1

Tabel 1.1
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Di Provinsi Sumatra Utara
Tahun 2013-2017

No	Sektor	Jumlah (Unit)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	UMKM	2.823.210	2.855.399	2.855.549	2.855.847	2.857.124

Sumber. Departemen Koperasi dan UMKM (2018)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dampak dari pertumbuhan yang signifikan adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah semakin meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru dan menggalinya potensi-potensi daerah karna pada umumnya UMKM memberdayakan bahan baku lokal.

Tabel 1.2
Jumlah Pelaku UMKM Kota Medan Tahun 2018

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Usaha Mikro	872
2	Usaha Kecil	113
3	Usaha Menengah	11
	Total	996

Sumber. Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan (2019)

Hasil penelitian Sedyasutri menemukan bahwa, keberadaan UMKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah krisis ekonomi. Di sisi lain, UMKM juga menghadapi banyak masalah, yaitu keterbatasan modal kerja, sumber daya manusia yang rendah dalam mengakses informasi dan mengelola modal, dan kurang cakupannya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM adalah hubungan dengan prospek bisnis yang kurang jelas dan perencanaan visi misi yang belum stabil. Pemberian informasi dan jaringan pasar, kemudahan akses pendanaan dan pendampingan serta peningkatan kapasitas teknologi informasi merupakan beberapa strategi peningkatan daya saing UMKM Indonesia, yang tak kalah

pentingnya adalah jiwa kewirausahaan yang tak pantang menyerah. Oleh karena itu diperlukan sinergi semua pihak pertama antara pelaku usaha, pemerintah dan lembaga keuangan mikro.³

Disisi lain, hasil penelitian Samantha Imanuel Panjaitan tentang Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Medan, menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Kota Medan, yaitu koordinasi antara instansi terkait khususnya Kantor Koperasi Kota Medan, belum terlaksana secara maksimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri, kualitas dan kuantitas aparatur Kantor Koperasi Kota Medan dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM di Kota Medan masih belum memadai, komitmen untuk membenahi pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM belum terlaksana dengan baik dan berbagai pengaruh-pengaruh yang tidak memadai.

Berbanding lurus dengan penelitian diatas, menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Utara, bahwa dalam perkembangannya di Kota Medan, masih terdapat beberapa isu-isu strategis yaitu: rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM, rendahnya pertumbuhan koperasi dan UKM, kurangnya koperasi dan UMKM yang mendapat akses permodalan, rendahnya daya saing koperasi dan usaha mikro dan kecil, terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan koperasi dan UMKM. (Departemen Koperasi dan UMKM 2018).

Untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan UMKM tersebut, masih dibutuhkan peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan

³ *ibid.*, hal. 4

yang akan sangat berdampak pada perkembangan UMKM di Kota Medan. Dan tentunya akan sejalan dengan pencapaian Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan sebagai Kota yang berdaya saing dengan iklim investasi yang menarik dan kondusif. Dengan demikian, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan juga dapat membangkitkan citra yang positif dari masyarakat terhadap UMKM di Kota Medan.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Zainun bahwa: “Betapapun baiknya sarana dan prasarana (sumber daya manajemen selain manusia) yang dimiliki oleh organisasi tidak akan banyak memiliki arti bagi tercapainya tujuan organisasi jika tanpa unsur manusianya”. Dengan demikian jelaslah, bahwa manusia (man) merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi. Hal ini menjadi alasan penelitian mengenai **“Analisis Strategis Dinas Koperasi Dalam Memberdayakan dan Mengembangkan UMKM di Kota Medan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi Dinas Koperasi Kota Medan dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kota Medan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tutjuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Koperasi Kota Medan dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi strategi pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terdahulu ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian dan memperkaya wawasan konsep praktek pekerjaan sosial terutama tentang intervensi pekerjaan sosial terhadap anak autisme.
2. Bagi peneliti, Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti secara lebih mendalam terkait peranan pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan dan melalui penelitian ini, penulis telah mempraktekkan secara nyata pembelajaran yang diperoleh dari masa perkuliahan.
3. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, Hasil Penelitian berguna sebagai referensi dan informasi tambahan dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan menengah di Kota Medan.
4. Bagi Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi program studi dan memberikan informasi tambahan yang berguna bagi mahasiswa/i dalam melakukan penelitian dengan objek

maupun masalah yang sama dan mengembangkan dimasa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dapat memberi masukan bagi Kantor Dinas Koperasi Kota Medan dan memberikan wawasan yang baik bagi masyarakat bagaimana cara mengembangkan sistem perkembangan UMKM yang ada Di Kota Medan sesuai dengan yang telah Di teliti pada Dinas Koperasi Kota Medan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu disusun sistematika penulisan. Adapun bagian ini sistematika skripsi ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORI

Bab ini penulis terlebih dahulu menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang diambil dari literatur-literatur dan bacaan-bacaan yang penulis anggap relevan serta penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai metodologi penelitian yang digunakan beserta alasannya, lokasi penelitian, instrumen penelitian, sampel

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengujian keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini Bagian ini berisi perbandingan hasil observasi dan pembahasan wawancara tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM di Kota Medan, fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, dan tentang Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan.

BAB V

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

BAB II

KERANGKA TEORI

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian adalah menjabarkan kerangka teori atau landasan teori yang terkait dalam penelitian ini. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), defenisi, dan proposi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Secara umum teori adalah konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui, jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori. Adanya landasan teoritis merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.

Berdasarkan defenisi dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa landasan teori atau kerangka teori merupakan titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroti atau memecahkan masalah. Pedoman teoritis yang membantu memuat pokok-pokok pikiran dan menggambarkan dari sudut pandang mana tersebut disoroti.

2.1 Pembangunan Ekonomi

Menurut Adam Smith dalam Arifin, et.al pembangunan ekonomi sebagai proses pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan mekanisme pasar. Suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika mekanisme pasar sudah berjalan dengan sempurna. Akumulasi modal akan berpengaruh

secara langsung terjadi karena penambahan faktor produksi yang akan meningkatkan output (produksi barang dan jasa).⁴

Pengaruh tidak langsung dari modal terhadap output adalah berupa peningkatan produktivitas melalui pembagian kerja atau spesifikasi. Semakin besar modal, semakin besar dimungkinkan pembagian kerja dan semakin tinggi juga produktivitas pekerja. Dalam jangka panjang mendorong pertumbuhan ekonomi sampai posisi stasioner, yaitu suatu kondisi jika sumber daya alam sudah sepenuhnya dimanfaatkan.

Schumpeter dalam Arifin, et.al berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship). Sebab merekalah yang memiliki kemampuan dan keberanian mengaplikasikan penemuan-penemuan baru (inovasi) dalam aktivitas produksi.⁵

Menurut Harrod-Domar dalam Arifin, et.al ketidakstabilan dalam perekonomian merupakan hal yang tidak terelakkan dan akan mengganggu keseimbangan (*full employment*) sehingga Intervensi pemerintah sangat diperlukan.⁶

Menurut Muljarijadi pembangunan dilaksanakan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa peningkatan jumlah dan komposisi output barang dan jasa yang bisa dihasilkan oleh sebuah negara/wilayah serta peningkatan pendapatan masyarakat perubahan pola komposisi output barang dan jasa sering kali dikenal sebagai perubahan struktural.⁷

⁴ Adam Smith dalam Arifin, et.al, **Membuka Cakrawala Ekonomi Untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas/Masraya Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial**, Yogyakarta: PT. Setiap Orna Inves, 2009, hal. 13

⁵ *Ibid.*, hal. 16

⁶ *Ibid.*, hal. 15

⁷ B. Muljarijadi, **Pembangunan Ekonomi Wilayah Pendekatan Analisis Tabel Input-Output**, Bandung: UNPAD PRESS, 2011, hal. 1

2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM sebagai berikut:

1. Usaha mikro, yaitu usaha yang produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria aset Rp500 juta dan Rp300 juta omzet Rp2,5 milyar.
2. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang akan dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Rp500 juta dan Rp300 juta omzet Rp2,5 milyar.
3. Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Rp500 juta aset Rp2,5 milyar dan Rp2,5 milyar omzet Rp50 milyar.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mentukan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan:

- a. Kekeluargaan
- b. Demokrasi ekonomi
- c. Kebersamaan
- d. Efisiensi berkeadilan

- e. Berkelanjutan
- f. Berwawasan lingkungan
- g. Kemandirian
- h. Keseimbangan kemajuan, dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatakan, “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”.

Menurut Absad, et al (2016:6) manfaat UMKM adalah:

1. Membuka Lapangan Kerja

Adanya UMKM tentunya membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah sosial. UMKM pun tidak hanya membutuhkan tenaga terdidik dapat dipakai juga tenaga kerja terlatih yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini membuat kesempatan kerja bagi masyarakat kecil juga semakin mudah.

2. Menjadi penyumbang terbesar nilai produk domestik bruto

Saat ini Indonesia telah menjadi salah satu anggota negara-negara G20 yang merupakan kumpulan 20 negara penghasil Produk Domestik Bruto terbesar di dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) sendiri merupakan sebuah ukuran makro ekonomi untuk memperlihatkan kemampuan dan jasa dalam waktu tertentu. Dari PDB inilah kemudian terlihat bagaimana kekuatan ekonomi dari suatu negara.

3. Salah satu solusi efektif bagi permasalahan ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah

Manfaat entrepreneurship dalam literatur teori ilmu ekonomi menurut Joseph A. Schumper, bahwa sebuah perekonomian akan tumbuh dan berkembang dikarenakan adanya inovasi dalam proses produksi. Inovasi tersebut hanya bisa dilakukan oleh seorang entrepreneur, sebab seorang wirausaha merupakan pelaku ekonomi yang menjadikan suatu hal dari tak bernilai menjadi bernilai. Semakin banyaknya entrepreneurship menjadikan solusi masalah perekonomian negara semakin terpecahkan. Kesempatan dalam UMKM tentunya akan membuat banyak dari golongan menengah kebawah untuk bisa berfikir secara kreatif dalam membangun usaha tanpa harus memegang modal besar terlebih dahulu. Para entrepreneurship ini akan semakin terpacu dalam menciptakan produksi dalam membidik pasar-pasar yang belum dijangkau oleh para pengusaha besar sebelumnya.

Menurut Budiarto, potensi besar sektor UMKM adalah;

1. Tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal semisal gejolak perekonomian dunia, seperti utang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatannya.
2. Selang waktu produksi (*time lag*) UMKM relatif singkat.
3. Keperluan modal UMKM, khususnya UMK, relatif kecil.
4. Sebagian besar usaha UMKM merupakan kegiatan pada karya dan mampu mendayagunakan *skill* dan *semi skill workers*.
5. Penciptaan lapangan kerja pada tingkat biaya modal yang rendah.
6. Kemampuan dalam *forward* dan *backward linkage* antara berbagai sektor
7. Memiliki peluang besar didalamnya bagi pengembangan dan adaptasi berbagai teknologi
8. Mengisi berbagai ceruk pasar yang tidak efisien bagi perusahaan besar, dan
9. Sebagai penopang eksistensi perusahaan skala besar.⁸

⁸ Budiarto, **Pengembangan UMKM: Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis**, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016, hal. 17

Menurut Prawirokusumo dalam Budiarto, karakteristik pelaku UMKM, yaitu sebagai berikut:

1. Fleksibel, dalam arti jika menghadapi hambatan dalam menjalankan usahanya akan mudah berpindah ke usaha lain
2. Dalam permodalan, tidak selalu tergantung pada modal dari luar, tetapi ia bisa berkembang dengan kekuatan modal sendiri
3. Dalam hal pinjaman (terutama pengusaha sektor tertentu seperti pedagang) sanggup mengembalikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi.⁹

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

H. Hugh menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Pertama adalah tujuan. Yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (*the desired end to be achieved*), bukan suatu tujuan yang hanya sekedar diinginkan saja bukanlah suatu tujuan, melainkan sekedar keinginan. Kedua rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu yang mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat, keputusan yakni tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, memberi dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima, dampak yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Pengertian publik dalam rangkaian kata *public policy* memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat dan umum. Hal ini dapat di lihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk memamtuhiya. Kebijakan

⁹ *ibid.*, hal. 5

publik merupakan salah satu output atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintah, disamping pelayanan pemerintah publik, barang publik, dan regulasi. Oleh karena itu, substansi dan proses kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan, terutama dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bentuk negara memberi pengaruh pada substansi dan proses kebijakan publik, karena peranan negara sebagai wadah dari proses kebijakan publik.

Sedangkan Anderson memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah 1) Kebijakan Publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) Kebijakan publik berisi tindakan pemerintah-pemerintah; 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang dimaksudkan untuk dilakukan; 4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintahan mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.¹⁰

Kebijakan Publik mengandung tiga komponen penting yang saling berkaitan dalam proses formulasi kebijakan publik yaitu:

1. Pelaku/Aktor Kebijakan

Orang-orang atau pelaku yang terlibat dalam perumusan kebijakan disebut aktor kebijakan Menurut James Anderson, aktor kebijakan dibagi dalam dua peran, yaitu pelaku resmi dan pelaku tidak resmi

- a. Pelaku resmi

Pelaku resmi adalah pemerintahan yang terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

¹⁰ Anderson, **Kebijakan Publik**, New York : Holt, Rinehart and Winston. 1975

b. Pelaku tidak resmi

Pelaku tidak resmi berasal dari luar lembaga pemerintahan, seperti kelompok kepentingan, partai politik, organisasi massa, warga negara dan individu.

2. Lingkungan Kebijakan

Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilakukan karena pengaruh lingkungan dan ditransformasikan dalam sistem politik.

3. Isi Kebijakan

Isi kebijakan adalah hasil akhir dari sebuah formulasi kebijakan yang telah terwujud dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sebagai pemegang mandate dari rakyat, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berorientasi pada kepentingan umum.

Jadi menurut pemahaman peneliti dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu tindakan dalam mengambil suatu keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. 4 Strategi Dinas Koperasi

Strategi saat ini sudah menjadi perbincangan yang sangat umum dan didefinisikan sedemikian rupa untuk kepentingan perusahaan ataupun organisasi

khususnya di Dinas Koperasi Kota Medan untuk mencapai suatu tujuan dalam Menganalisis Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM di Kota Medan. Makna yang terkandung dalam strategi dinas koperasi tersebut yaitu bagaimana tindakan yang dirancang untuk penyesuaian kompetensi pada Kantor Koperasi Kota Medan baik secara eksternal maupun internal dalam Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM di Kota Medan.

2.5 Pemberdayaan

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Hafifuluddin et, al Pemberdayaan juga bisa diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangun di daerah, termasuk aparatur, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat.¹¹

Dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat ini, tentunya tidak terlepas dari peran pelaku pemberdayaan, baik oleh pemerintah maupun oleh nonpemerintah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mendefenisikan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap usaha

¹¹ Hafifuluddin, **Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis “Community Based Economic Development”**, Universitas Brawijaya, 2014, hal. 17

Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.

Menurut Nur pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh instansi atau orang dengan maksud untuk menumbuhkan atau mengembangkan terhadap hal yang menjadi objek yang diberdayakan sehingga menjadi lebih bertumbuh dan berkembang, dalam hal ini pertumbuhan dan perkembangan UMKM.¹²

Menurut Purba pemberdayaan UMKM titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya UMKM yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan UMKM yang demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi justru sebagai subyek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan UMKM secara umum.¹³

“Sebagaimana proses pemberdayaan masyarakat, menurut Purba proses pemberdayaan UMKM juga tidak jauh berbeda dari pemberdayaan masyarakat”.¹⁴ Pemberdayaan UMKM sebagai suatu proses program harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat pelaku-pelaku UMKM agar dapat lebih pandai dan mampu mengembangkan komunikasi antar mereka sehingga pada akhirnya mereka saling dapat berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi, ketika agen pengubah, baik yang berasal dari lembaga pemerintahan atau nonpemerintah telah menyelesaikan program pemberdayaan UMKM tersebut, pemberdayaan UMKM sebagai suatu proses dapat terus berlangsung.

¹² D. S. Nur, **Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda**, Universitas Mulawarna, Samarinda: 2017, hal. 5

¹³ U. A. Purba, **Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Begadai Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah**, Universitas Sumatra Utara, Medan: 2013, hal. 29

¹⁴ *Ibid.*, hal. 29

Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia mengembangkan filosofi lima jari/*five finger philosophy*, maksudnya setiap jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan.

1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai agent of development (agen pembangunan)
2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, menerbitkan izin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk *Promoting Enterprise to Credit (PEAC) Units*, perusahaan penjamin kredit.
4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM
5. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.

Pemberdayaan UMKM digambarkan melalui 5 aspek, sebagai berikut:

1. Permodalan

Menurut Riyanto dan Primyastanto “permodalan usaha secara kajian ilmu ekonomi adalah bahan mentah atau dana dalam bentuk uang kas yang digabungkan dengan faktor produksi berupa tanah dan tenaga kerja berkolaborasi untuk menghasilkan suatu barang baru”.¹⁵

2. Pemasaran

Menurut Dermanto dan Wardaya pemasaran ini merupakan proses dari seseorang atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain atau organisasi lain agar mereka yang menginginkan dan memerlukan produk atau jasa dapat terpenuhi dan mereka yang memiliki produk atau jasa dapat memperoleh keuntungan. Hubungan ini diharapkan dapat berjalan dalam waktu jangka panjang.¹⁶

Simamora “pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang digunakan individu, rumah tangga ataupun organisasi untuk memperoleh kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain”.¹⁷

3. Teknologi

Menurut Latif dan Ahmad dalam Budiarto “bagi suatu negara teknologi mempunyai posisi sentral dalam usahanya meraih berbagai target bisnis dan pertumbuhan ekonomi, produktifitas industri, serta dala perdagangan dan daya saing internasional”.¹⁸

Menurut Djaktar untuk mempercepat kemajuan aktifitas bisnis sudah barang tentu perlu mengadopsi penggunaan teknologi sebagai infrastruktur manajemen yang harus dilakukan. Memanfaatkan jasa telpon, faksimile, e-mail, internet, dan lain sebagainya yang kian hari kian modern dengan

¹⁵ M. Primsyatanto, **Aplikasi Teori Pemasaran Pada Komoditi Perikanan Dan Kelautan**, Universitas Malang, Malang: 2016, hal. 55

¹⁶ Dermanto, **Manajemen Pemasaran Untuk Mahasiswa, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hal. 5

¹⁷ B. Simamora, **Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel**, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003, hal. 20

¹⁸ Budiarto, Op. Cit., hal. 104

sendirinya merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Tanpa banyak mengadopsi jasa beragam teknologi tersebut, manajemen sebuah perusahaan tidak akan berjalan cepat atau mampu mengimbangi kemajuan perusahaan lain yang lebih maju untuk menjadi mitra bisnisnya.¹⁹

4. Sumber Daya Manusia

Menurut Sutrisno “sumber daya diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari diri manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Dengan berpegang pada pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (power)”²⁰

Menurut Ndraha dalam Sutrisno sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetatif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: *intelligence, creativity, dan imagination*; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar, seperti bahan mentah, lahan air, tenaga otot dan sebagainya.²¹

5. Perizinan

Menurut Yusriadi pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan perizinan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang ada pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Pusat, di Daerah, dan lingkungan BUMN atau BUMD, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bentuk produk pelayanannya adalah izin atau warkat.²²

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) mencakup:

- a. Pelayanan atas permohonan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh PPTSP;

¹⁹ Djaktar, **Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi**, Jakarta: Penyebar Swadaya, 2012, hal. 174

²⁰ Sutrisno, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 4

²¹ *Ibid.*, hal. 4

²² Yusriadi, **Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik**, Yogyakarta: 2018, hal. 92

- b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah
- c. Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- d. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan

2. 6 Tujuan Pemberdayaan UMKM

Pasal 5 UU No. 20/2008 menentukan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian masyarakat nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;

2. 7 Prinsip Pemberdayaan UMKM

Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 menyatakan Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Aspek manajerial meliputi peningkatan produktivitas, pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Aspek permodalan

3. Mengembangkan pola kemitraan
4. Mengembangkan sentra industri kecil dan pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama); Kopinkra (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

2. 8 Pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 ayat (10) Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk mendampingkan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

Pengembangan UMKM digambarkan melalui 4 aspek:

1. Kualitas Produk

Kualitas produk adalah keseluruhan kelengkapan dan karakteristik dari produk atau layanan yang mempengaruhi kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan baik yang dinyatakan maupun tersirat.

2. Diservikasi Produk

Menurut Ishmantono “upaya perusahaan untuk meningkatkan penjualan melalui penganekaregaman produk, baik lewat pengembangan produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada”.²³ Namun menurut Primyastanto “diservikasi produk, menciptakan produk-produk baru sesuai segmentasi pasar yang dituju berdasarkan selera dan daya beli konsumen”.²⁴ Menurut Wibowo “disertivikasi berarti membuat produk baru yang lain dari yang sudah ada”.²⁵

3. Produksi

Menurut Putong “produksi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula”.²⁶ Menurut Khusaini “produksi dalam beberapa buku teori ekonomi sering didefinisikan sebagai kegiatan untuk menciptakan guna. Dalam hal ini guna berarti kemampuan, yaitu kemampuan barang/jasa dalam memenuhi kebutuhan”.²⁷

Menurut Poniman dan Hidayat “keuntungan adalah laba atau selisih nilai penjualan terhadap biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan atau

²³ Ismanthono, **Kamus Istilah Ekonomi Populer**, Jakarta: Kompas, 2006, hal. 65

²⁴ Primyastanto, *Op.Cit.*, hal. 158

²⁵ S. Wibowo, **Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil**, Jakarta: Penebar Swadaya, 2008, hal. 86

²⁶ I. Putong, **Teori Ekonomi Mikro: Konvensional Dan Syariah**, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 7

²⁷ Khusaini, **Ekonomi Mikro: Dasar-Dasar Teori**, Malang: UB. Press, 2013, hal. 67

memproduksi barang atau jasa”.²⁸ Menurut Wahab dan Primyastanto “keuntungan usaha adalah besarnya penerimaan dikurangi dengan biaya pada suatu proses produksi baik secara konstan atau tidak tetap pada suatu proyek usaha tertentu”.²⁹

2.9 Prinsip-Prinsip Pengembangan UMKM

Agar pengembangan UMKM dilaksanakan tidak terlepas dari koridor pengelolaan perguruan tinggi, menurut Budiarto, dkk terdapat sejumlah prinsip yang perlu dijadikan acuan.

1. Kemaslahatan
2. Kemandirian Bangsa
3. Terukur
4. Komprehensif³⁰

2.10 Landasan Pengembangan UMKM

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang UMKM menurut Budiarto, dkk akses perdana bagi UMKM dilakukan dalam rangka:

- a. Memperluas sumber perdanaan dan memfasilitasi akses kredit
 - b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringan
 - c. Memberikan kemudahan untuk mendapatkan pendanaan
1. Aspek Sarana dan Prasarana, dilakukan dalam rangka:

²⁸ F. Poniman, **Manajemen HR STIFn Terobosan Untuk Mendongkrak Produktivitas**. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015, hal. 12

²⁹ Primyastanto, Op.Cit., hal. 57

³⁰ Budiarto, Op. Cit., hal. 96

- a. Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan UMKM
 - b. Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu
2. Aspek informasi usaha, dilakukan dalam rangka:
- a. Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informan kredit
 - b. Menyebarkan antara lain informasi pasar, sumber pembiayaan, komoditas pinjaman, design-teknologi dan mutu
 - c. Jaminan transparan dan akses yang sama.³¹
3. Aspek keimitraan dilakukan dalam rangka:
- a. Mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah
 - b. Mewujudkan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar
 - c. Mendorong terjadinya hubungan saling menguntungkan dalam transaksi usaha antar UMKM
 - d. Membentuk struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen
4. Aspek perizinan usaha, dilakukan dalam rangka:
- a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan layanan satu pintu
 - b. Upaya pembebasan biaya perizinan bagi UMKM
5. Aspek kesempatan berusaha, dilakukan dalam rangka:

³¹ Budiarto, Op, Cit., hal. 92

- a. Menentukan peruntukan tempat usaha, yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima dan sebagainya
 - b. Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk UMKM di subsektor perdagangan ritel
 - c. Mendukung bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karyawan, serta memiliki warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun
 - d. Melindungi usaha terbuka bagi usaha besar dengan syarat kerjasama dengan UMKM
 - e. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan UMKM
 - f. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
6. Aspek promosi dagang, ditujukan dalam rangka:
- a. Meningkatkan promosi produk UMKM di dalam maupun luar negeri
 - b. Memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk UMKM
 - c. Memberikan insentif untuk UMKM yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi
 - d. Memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual
7. Aspek dukungan kelembagaan ditujukan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga

layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya.

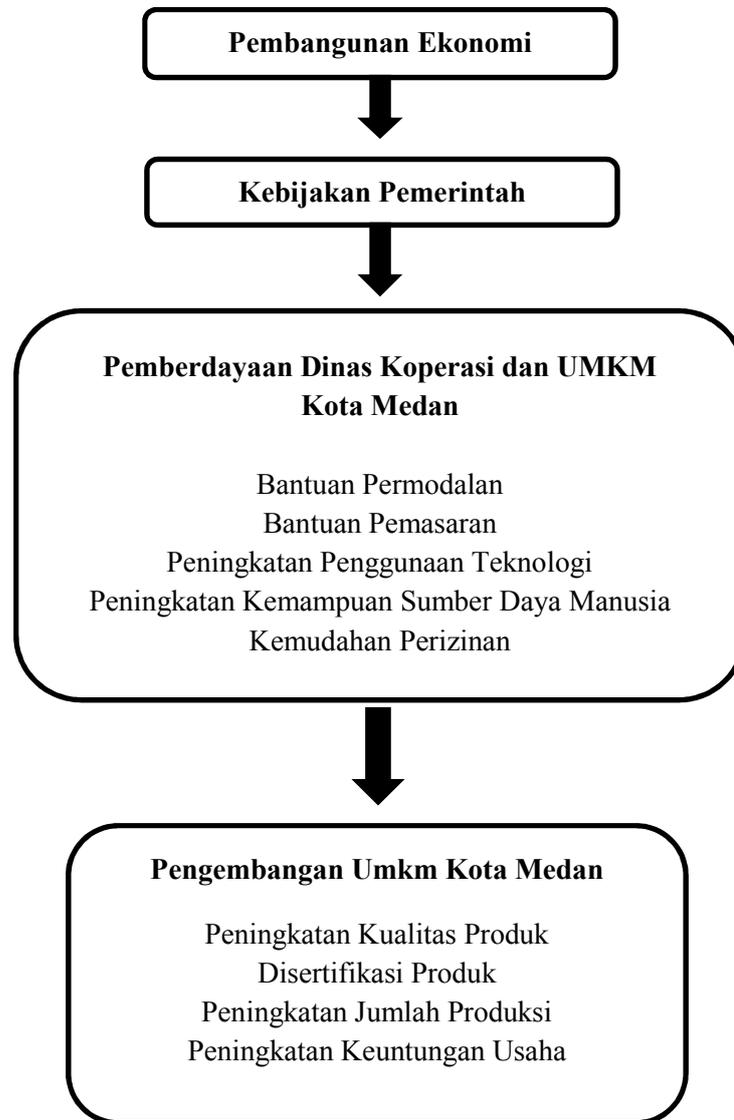
2.11 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah alur berpikir suatu penelitian dan penjelasan pemahaman pokok tentang permasalahan yang hendak diteliti. Dengan adanya kerangka berpikir dapat memberikan pedoman dan mempermudah dalam kegiatan penelitian pengelolaan data, juga untuk menganalisa agar mendapatkan hasil penelitian yang benar, maka penulis membuat kerangka pemikiran dengan menjabarkan penelitian yang akan dibahas. Berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dengan adanya program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM di Kota Medan usaha kecil mikro dan menengah masyarakat semakin berkembang dan mempunyai bantuan dari pihak Dinas Koperasi dalam bentuk bantuan permodalan, bantuan alat, dan lain-lain.

Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dan UMKM telah menjadi perhatian beberapa peneliti. Juga merupakan perhatian bagi UMKM. Dengan adanya pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan akan tercipta pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, di Kota Medan

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan Umkm Kota Medan dalam pengembangan UMKM di Kota Medan.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Peneliti (2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Metodologi penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian. Karena semua kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian sangat tergantung pada metode yang digunakan. Sesuai dengan pendapat Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk dapat mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas mendalam tentang apa yang sedang diteliti yang menjadi pokok permasalahan.

Selanjutnya Lisa Horison berpendapat bahwa penelitian kualitatif diartikan sebagai paradigma. Bahwa tidak banyak data yang dikumpulkan oleh peneliti tetapi ini bukan justifikasi yang adil. Dalam akses umum ke data kualitatif yang tersedia, ada isu praktis berkaitan dengan “keterbukaan” data yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi.

3.2 Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Jl.Gagot Subroto No. KM 77, Cinta Damai, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatra Utara 2020.

Penentuan Lokasi penelitian ini berguna untuk mendapatkan data-data yang akurat dan menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan peneliti dalam menyesuaikan konteks penelitian yaitu mengenai Implementasi Pengembangan UMKM di Dinas Koperasi Kota Medan.

3.3 Informan Penelitian

Menurut Mulya, “Informan adalah pihak yang diharapkan dapat memberikan informasi melalui berbagai pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti termasuk untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh melalui dokumen dan survei”.³²

“Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian”.³³ Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Peneliti memilih informan berdasarkan teknik purposive. Teknik purposive adalah “peneliti memilih partisipan secara acak berdasarkan karakter yang unik atau pengalaman, sikap maupun persepsi mereka; ketika kategori konseptual atau teoritis berkembang selama proses wawancara, peneliti mencari partisipan baru untuk menguji pola yang muncul

34

Ada tiga kategori informan menurut Suyanto yaitu:

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian adalah Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan.

³² H. Mulya, **Metode Penelitian Kualitatif**, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hal. 69

³³ Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012, hal. 97

³⁴ D. R. Cooper, **Metode Penelitian Bisnis**, Jakarta: Salemba Empat, 2017, hal. 178

2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Pemilik UMKM Batik Mardiyah dan Pemilik UMKM Batik Mardiyah dan Pemilik UMKM Irjie Kaligrafi menjadi informan utama karena UMKM ini merupakan UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang terlibat dalam pemberdayaan yang di berikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Meda.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Karyawan UMKM Irjie Kaligrafi. Alasan penulis memilih informan tambahan karyawan UMKM Mardiyah dan karyawan UMKM Irjie Kaligrafi adalah berdasarkan dari rekomendasi masing-masing pemilik UMKM. Yaitu pemilik UMKM Batik Mardiyah dan pemilik UMKM Irjie Kaligrafi.³⁵

Tabel 3.1
Informasi Yang dibutuhkan Dalam Wawancara

No	Informan Penelitian	Informan Yang Dibutuhkan	Jumlah
1	Kepala Seksi pengembangan, penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan (Informan Kunci)	a. Deskripsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan b. struktur organisasi c. program pemberdayaan yang diberikan dalam bantuan permodalan d. program pemberdayaan yang diberikan dalam bantuan pemasaran e. program pemberdayaan yang diberikan dalam peningkatan penggunaan teknologi f. program pemberdayaan yang diberikan dalam peningkatan sumber daya manusia g. program pemberdayaan yang diberikan dalam kemudahan perijinan h. pengaruh pemberdayaan dalam pengembangan kualitas produk UMKM binaan i. pengaruh pemberdayaan dalam disersifikasi produk UMKM binaan j. pengaruh pemberdayaan dalam peningkatan jumlah produk	1

³⁵ B, Suyanto, **Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan**, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hal. 172

		UMKM binaan k. pengaruh pemberdayaan dalam kepentingan usaha UMKM binaan	
2	Pemilik usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Binaan Dinas Koperasi Kota Medan (Informan Utama)	<p>a. peran pemberdayaan yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dalam bantuan permodalan</p> <p>b. peran pemberdayaan yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dalam bantuan pemasaran-pemasaran</p> <p>c. program pemberdayaan yang di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan diberikan dalam peningkatan penggunaan teknologi</p> <p>d. program pemberdayaan yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dalam peningkatan sumber daya manusia</p> <p>e. program pemberdayaan yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dalam kemudahan perijinan</p> <p>f. pengaruh pemberdayaan dalam pengembangan kualitas produk UMKM binaan</p> <p>g. pengaruh pemberdayaan dalam disersifikasi produk UMKM binaan</p> <p>h. pengaruh pemberdayaan dalam peningkatan jumlah produksi UMKM binaan</p> <p>i. pengaruh pemberdayaan dalam peningkatan keuntungan usaha UMKM binaan</p>	2
3	Karyawan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Binaan Dinas Koperasi dan UMKM kota Medan	<p>a. peran pemberdayaan yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dalam bantuan permodalan</p> <p>b. peran pemberdayaan yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dalam bantuan pemasaran-pemasaran</p> <p>c. program pemberdayaan yang</p>	2

		<p>di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan diberikan dalam peningkatan penggunaan teknologi</p> <p>d. program pemberdayaan yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dalam peningkatan sumber daya manusia</p> <p>e. program pemberdayaan yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dalam kemudahan perijinan</p> <p>f. pengaruh pemberdayaan dalam pengembangan kualitas produk UMKM binaan</p> <p>g. pengaruh pemberdayaan dalam disersifikasi produk UMKM binaan</p> <p>h. pengaruh pemberdayaan dalam peningkatan jumlah produksi UMKM binaan</p> <p>i. pengaruh pemberdayaan dalam peningkatan keuntungan usaha UMKM binaan</p>	
4	Total		5

Sumber Dinas Koperasi Kota Medan Tahun 2018

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell, “teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari atas empat strategi pengumpulan data, yaitu observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual”.³⁶

1. Observasi dan Studi Lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan melakukan pencatatan terkait informasi yang relevan dengan penelitian.
2. Wawancara. Wawancara dalam penelitian dilakukan untuk memperoleh data primer baik dari key informan, maupun informan lain yang perannya juga relevan dalam mendukung penelitian.
3. Dokumen-dokumen kualitatif dan studi kepustakaan, terutama mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengembangan UMKM di Kota Medan, misalnya

³⁶ John W. Creswell, **Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 266

informasi dari peraturan dan petunjuk pelaksanaan pengembangan UMKM, surat kabar, majalah, website, laporan kantor UMKM Kota Medan, brosur pelayanan kantor UMKM, data-data dinding yang dianggap relevan, serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian.

4. Audio dan Visual, berupa rekaman hasil wawancara dan dokumentasi pelaksanaan pengembangan UMKM khususnya di Kantor Koperasi Kota Medan.³⁷

3. 5 Defenisi Konsep

Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka defenisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya Pemerintah Daerah Kota Medan, dalam meningkatkan kemampuan UMKM meliputi bidang bantuan permodalan, bantuan pemasaran, peningkatan penggunaan teknologi, peningkatan kemampuan SDM dan kemudahan perizinan usaha, agar UMKM di Kota Medan mampu berkembang.
 - a. Bantuan permodalan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan untuk membiayai kebutuhan awal usaha atau mengembangkan usaha yang telah berjalan agar semakin meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha.
 - b. Bantuan pemasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala kegiatan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan volume penjualan sebagai strategi untuk menjangkau pembeli untuk melakukan pembelian.
 - c. Peningkatan penggunaan teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan barang-barang yang bisa diklasikasi ke berbagai bidang sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi.

³⁷ Ibid., hal. 267-268

- d. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dimaksud dalam penelitian ini merupakan peningkatan kemampuan orang-orang yang dipekerjakan dalam suatu usaha yang menggunakan kecerdasan ataupun kemampuan fisiknya dalam menggerakkan usaha dan yang nantinya dapat mencapai tujuan usaha itu sendiri.
 - e. Kemudahan perizinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha dengan menyederhanakan sistem dan prosedur perizinan bagi seorang pengusaha atau suatu usaha
2. Pengembangan UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan proses usaha mikro kecil menengah di Kota Medan dalam memperluas peluang pertumbuhan usaha yang dapat dilihat dari, peningkatan kualitas produk, diservikasi produk, peningkatan jumlah produk dan peningkatan keuntungan usaha. (UU Nomor 20 tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002.
- a. Peningkatan kualitas produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peningkatan keunggulan atau keistimewaan suatu produk yang mampu memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen.
 - b. Disertifikasi produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan suatu usaha untuk membuat suatu produk barang atau jasa menjadi lebih beragam atau tidak terpaku hanya pada suatu jenis barang atau jasa.
 - c. Peningkatan jumlah produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu usaha dalam meningkatkan jumlah barang maupun jasa yang di produksi untuk menghasilkan laba dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- d. Peningkatan keuntungan usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peningkatan laba usaha dalam periode tertentu yang diperoleh dari apa yang sudah dihasilkan, dikerjakan atau dijual oleh suatu usaha.

3. 6 Teknik Analisis Data

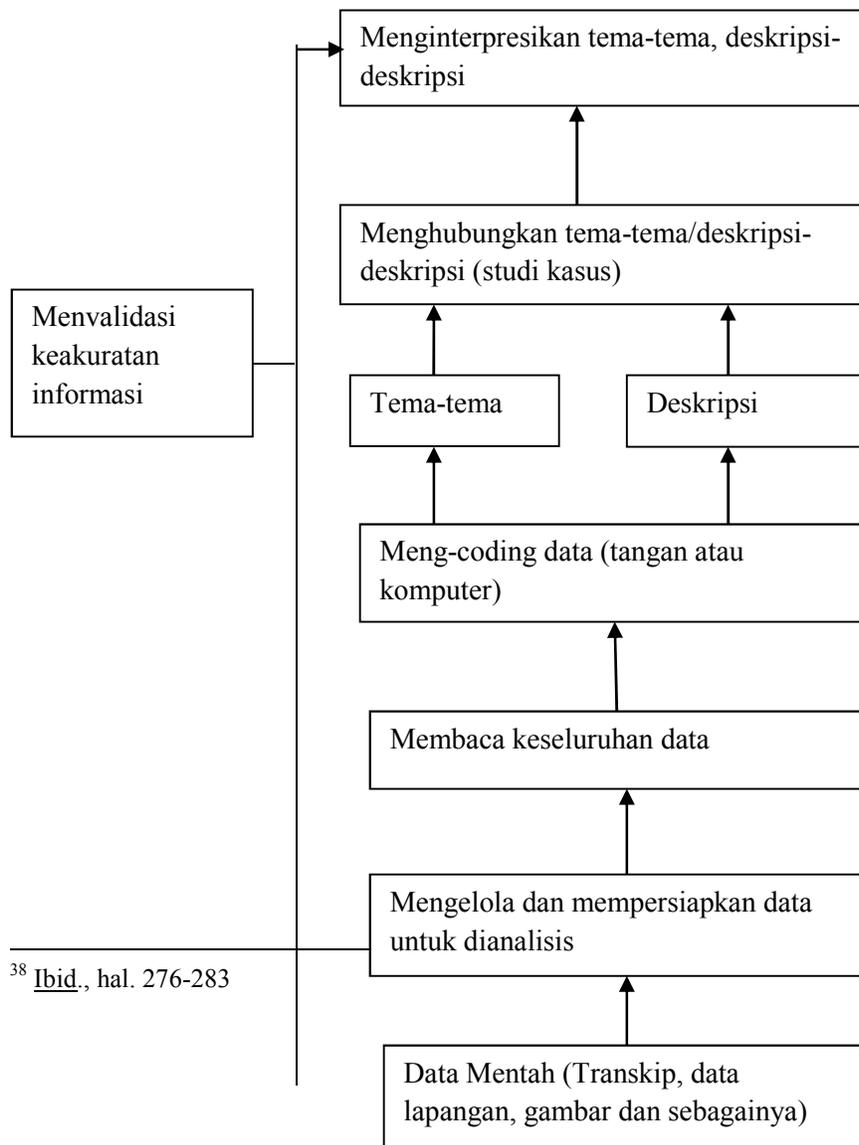
Analisis data merupakan suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data terbuka, didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan. Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, proses penggambaran dari daerah penelitian. Dari penelitian ini diperoleh gambaran tentang Analisis Strategi Dinas Koperasi Kota Medan Dalam Memberdayakan dan Mengembangkan UMKM Di Kota Medan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara men-scanning materi, mengetik data apangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun generasi sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengelola materi/ informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau pragraf-pragraf).
4. Menetapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasikan atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan.³⁸

Gambar 3.1 Teknik Analisa Data





Sumber : Jhon W. Creswell (2013:227)

3.7 Uji Reliabilitas dan Validitas

Dalam penelitian kualitatif, validitas ini tidak memiliki konotasi yang sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif, tidak pula sejajar dengan realibilitas (yang berarti pengujian stabilitas dan konsistensi respon) ataupun dengan generalisabilitas (yang berarti validitas eksternal atau hasil penelitian yang dapat diterapkan pada setting, orang atau sampel yang baru) dalam penelitian kuantitatif.

3.7.1 Uji Reliabilitas Data

Yin menegaskan bahwa para peneliti kualitatif harus mendokumentasikan prosedur prosedur studi kasus mereka dan mendokumentasikan sebanyak-banyaknya mungkin langkahlangkah dalam prosedur tersebut. Dia juga mendokumentasikan agar para peneliti kualitatif merancang secara cermat protokol dan database studi kasusnya. Gibs merinci sejumlah prosedur realibilitas data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut :

1. Ceklah hasil transkripsi untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang dibuat selama proses transkripsi.

2. Pastikan tidak ada kode-kode selama proses coding. Hal ini dapat dilakukan dengan terus membandingkan data dengan kode-kode atau dengan menulis catatan tentang kode-kode dan defenisi-defenisinya.
3. Untuk penelitian berbentuk tim, diskusikanlah kode-kode bersama-sama patner satu tim dalam pertemuam-pertemuan rutin atau sharing analisis.
4. Lakukan cross-check dan bandingkan kode-kode yang dibuat oleh peneliti lain dengan kode-kode yang telah buat sendiri.

3.7.2. Uji Validitas Data

Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Berikut ini adalah delapan strategi validitas yang disusun mulai dari yang paling sering dan mudah digunakan hingga yang jarang dan sulit diterapkan :

1. Mentriangulasikan (triangulasi) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dengan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara kohere. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipasi akan menambahkan validitas penelitian.
2. Menerapkan member checking ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi-deskripsi atau tema-tema spesifik ke hadapan

partisipasi untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan/ deskripsi/ tema tersebut sudah akurat.

3. Membuat deskripsi yang kaya dan padat (rich and thick description) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan setting penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipasi.
4. Mengklasifikasi bias yang mungkin dibawa penelitian kedalam penelitian. Dengan melakukan refleksi dari terhadap kemungkinan munculnya bias dari penelitian, peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur yang akan dirasakan oleh pembaca.
5. Menyajikan informasi “yang berbeda” atau “negatif” (negative or discrepant information) yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu.
6. Memanfaatkan waktu yang relative lama (prolonged time) dilapangan atau dilokasi penelitian.
7. Melakukan tanya-jawab dengan sesama rekan peneliti (peer debriefing) untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian.
8. Mengajak seorang auditor (external auditor) untuk meriview keseluruhan proyek penelitian.

